

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2007-2013**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Disusun Oleh:

Ani Nurlaili

NIM. 11404241025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2007-2013**

Oleh:

ANI NURLAILI

NIM. 11404241025

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Februari 2016

Dosen Pembimbing



Mustofa, M.Sc.

NIP. 19800313 200604 1 001

PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA TAHUN 2007-2013

Oleh:

ANI NURLAILI

11404241025

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2016 dan dinyatakan lulus.



Yogyakarta, 23 Maret 2016

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Nurlaili

NIM : 11404241025

Jurusan : Pendidikan Ekonomi

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan

Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 3 Maret 2016

Yang Menyatakan,


Ani Nurlaili

NIM. 11404241025

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang pada diri mereka "

(QS. Ar-Ra'd: 11)

"Jika karena hal-hal kecil saja kamu mengeluh, bagaimana bisa hal-hal besar datang kepadamu"

(Penulis)

PERSEMPAHAN

Diriku sendiri, yang akhirnya berhasil menyelesaikan amanah ini.

Untuk Bapak Sumarno dan Ibu Rohyati, terimakasih telah menjadi orang tua yang demokratis dan peduli pada pendidikan kami.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2007-2013**

**Oleh:
ANI NURLAILI
NIM. 11404241025**

ABSTRAK

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-2013.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa *crosssection* 6 provinsi se Jawa dan *time series* selama 2007-2013. Data diolah dengan analisis data panel dengan regresi *fixed effect model*.

Seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial variabel PDRB per kapita, populasi penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Kata kunci: ketimpangan distribusi pendapatan, PDRB per kapita, Populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi fiskal, *fixed effect model*.

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING INEQUALITY
INCOME DISTRIBUTIONS IN JAVA
IN 2007-2013**

**ANI NURLAILI
11404241025**

ABSTRACT

One of the criteria in measuring the success of development in a country is the level of inequality in income distribution. The unequal distribution of income can be caused by various factors, both economic and non-economic factors. This study aimed to analyze the factors affecting unequal distribution of income in Java in 2007-2013. This study is of quantitative research. The data used were in the form of *cross-section* tabulations from 6 provinces in Java and the *time series* during 2007-2013. The data were analyzed using panel data analysis with *fixed-effect model* regression. All the research variables proved to simultaneously influence the unequal distribution of income. In partial, the variables of Regional Gross Domestic Product (RGDP) per capita, population, and the rate of open unemployment significantly and positively affect the unequal distribution of income, while the degree of fiscal decentralization does not affect the unequal distribution of income.

Keywords: *unequal distribution of income, RGDP per capita, population, rate of open unemployment, degree of fiscal decentralization, fixed effect model*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013” untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Tejo Nurseto selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan dan bantuan guna kelancaran skripsi ini.
3. Ibu Daru Wahyuni, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi periode 2011-2015 yang telah memberikan bantuan di awal penulisan skripsi ini
4. Mustofa, M.Sc selaku pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan nasehat selamat masa studi sampai terselesaiannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan wawasannya.

6. Mas Dating selaku admin jurusan yang membantu segala kelancaran administrasi selama penulisan skripsi ini.
7. Ibuk, Bapak, Irma, Kurni, mbak Zizie untuk semua dukungan, doa, dan kasih sayangnya tanpa henti.
8. Devika Rachmawati, thanks you for being my unbiological sister. Thanks for the supports and advices.
9. Via, Rina, Pitma, Riska, Hesty, Indah Pratiwi, Indah Rahayu. I couldn't imagine my university time would be like without you guys. Keep being awesome!
10. Pelangi Student Company, UKMF CIES FE UNY, dan UKM Bahasa Asing SAFEL UNY untuk semua pelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun.
11. Teman-teman Pendidikan Ekonomi 2011.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

Yogyakarta, 3 Maret 2016

Penulis,



Ani Nurlaili

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Deskripsi Teori.....	12
1. Pembangunan Ekonomi	12
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	13
3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Indeks Gini	15
4. PDRB Per Kapita dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	17
5. Populasi Penduduk dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	18
6. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan	

Distribusi Pendapatan	19
7. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan..	20
B. Penelitian yang Relevan.....	23
C. Kerangka Berpikir.....	25
D. Hipotesis	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Desain Penelitian	30
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	30
C. Data dan Jenis Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Data Penelitian.....	40
B. Estimasi Model	51
C. Hasil Uji Asumsi Klasik	52
D. Hasil Analisis Regresi Data Panel	54
E. Hasil Uji Signifikansi.....	56
F. Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
C. Keterbatasan Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau-pulau di Indonesia	2
2. PDRB per Kapita ADHK 2000.....	3
3. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	22
4. Indikator Hasil Uji Durbin-Watson	37
5. Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	40
6. Hasil Uji Multikolinearitas	54
7. Hasil Regresi Data Panel.....	55
8. Persentase Pembentukan PDRB per Sektor Lapangan Usaha	61
9. Persentase Penyerapan tenaga kerja per sektor lapangan usaha 2013	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Berpikir.....	28
2. Perkembangan Indeks Gini Provinsi se Jawa	41
3. Perkembangan PDRB per Kapita se Jawa (ribuan)	43
4. Perkembangan jumlah penduduk se Jawa (Ribuan)	46
5. Perkembangan TPT se Jawa	47
6. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal se Jawa	49
7. Hasil Uji Normalitas	53
8. Rata-rata Kenaikan PDRB per kapita se Jawa (ribuan)	60
9. Rata-rata Kenaikan Indeks Gini se Jawa.....	60
10. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi Tahun 2010	64
11. Perkembangan Rata-rata TPT Pulau Jawa.....	65
12. Rata-rata Pencapaian Derajat Desentralisasi Fiskal Pulau Jawa.....	67
13. Perbandingan komposisi pembentuk PAD (pajak dan non pajak) provinsi se Jawa tahun 2013	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Penelitian	77
2. Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	78
3. Uji Spesifikasi Model	78
4.Uji Normalitas.....	79
5. Uji Heteroskedastisitas.....	79
6. Uji Multikolinearitas	80
7. Uji Autokorelasi.....	80
8. Hasil Regresi Data Panel.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu Negara. Secara agregat pertumbuhan ekonomi dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto atau PDB suatu Negara. Dalam komponen pertumbuhan itu sendiri, Todaro (2006: 118) membagi tiga komponen penting pertumbuhan ekonomi, pertama adalah akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyelesaikan pekerjaan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan suatu Negara, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006 22). Secara singkat, pembangunan bertujuan mensejahterakan warga masyarakat tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga non ekonomi.

Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 berada di angka 5,9%. Laju pertumbuhan ekonomi nasional yang positif tersebut ditunjang dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang juga menunjukkan angka yang positif.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau-pulau di Indonesia

Pulau	PDRB		Pertumbuhan Ekonomi tahun 2013	
	(dalam miliar)			
	2012	2013		
Sumatera	525.689	553.400	5,27%	
Jawa	1.542.370	1.637.076	6,14%	
Bali	32.804	34.788	6,05%	
Kalimantan	209.927	217.261	3,49%	
Sulawesi	125.122	134.936	7,84%	
Papua, Maluku, NT	76.811	83.609	8,85%	
Indonesia	2.512.723	2.661.071	5,90%	

Sumber: BPS (2014)

Dari tabel 1 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 berada pada angka yang positif, namun persentase pertumbuhan ini masih kurang merata antar pulau. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang masih kurang merata, nilai PDRB juga terlihat sangat timpang antar pulau.

Pulau Jawa yang sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan memiliki nilai PDRB yang jauh melebihi nilai PDRB pulau lain. Sumbangan PDRB pulau Jawa terhadap PDB nasional tahun 2013 merupakan yang terbesar yaitu sebesar 61,52%. Besarnya sumbangan PDRB pulau Jawa terhadap PDB nasional ternyata masih menyisakan permasalahan ekonomi di daerahnya sendiri, yaitu timpangnya distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh PDRB per kapita.

Pada tahun 2012 maupun 2013, perolehan PDRB per kapita DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Pada tahun 2013, PDRB per kapita DKI Jakarta sebesar 47 juta rupiah. Pada tahun yang sama PDRB per Kapita Jawa Tengah dan DIY tujuh kali lebih rendah dibanding DKI Jakarta yaitu sebesar 6,7 juta rupiah dan 6,8 juta rupiah. Data ini menunjukkan bahwa di Pulau Jawa sendiri yang merupakan pusat perekonomian, pencapian kesejateraan ekonominya masih belum merata.

Tabel 2. PDRB per Kapita ADHK 2000

Provinsi	PDRB per Kapita ADHK 2000 tahun (ribu rupiah)	
	2012	2013
DKI Jakarta	45.610	47.872
Jawa Barat	8.170	8.532
Jawa Tengah	6.390	6.707
DI Yogyakarta	6.561	6.834
Jawa Timur	10.331	10.933
Banten	8.929	9.243

Sumber: BPS (2014)

Besarnya perbedaan pendapatan per kapita antar provinsi tersebut diikuti dengan Indeks Gini yang cukup tinggi di beberapa provinsi. Indeks Gini atau ukuran ketimpangan distribusi pendapatan mencatat ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 0,41 pada tahun 2013. DIY, Gorontalo, Papua Barat, dan DKI Jakarta adalah provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 0,44; 0,437; 0,43 dan 0,43. Dua provinsi di pulau Jawa, DKI Jakarta dan DIY, yang merupakan provinsi dengan PDRB per

kapita tertinggi dan terendah kedua, adalah provinsi yang tercatat dengan Indeks Gini melebihi rata-rata nasional.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia (Tulus, 2011: 181). Meskipun Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan, baik perekonomian maupun pemerintahan, nyatanya kondisi ini masih menimbulkan masalah pembangunan bagi dua provinsi tersebut dengan indeks ketimpangan distribusi pendapatan yang masih tinggi.

Selain itu, kondisi ketimpangan distribusi pendapatan tidak bisa dilepaskan dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian Akai dan Sakata (2005) menunjukkan bahwa penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Di lain sisi, meskipun penduduk membawa pengaruh yang tidak baik terhadap ketimpangan, dengan menekan dan mengupayakan tingkat pengangguran yang rendah ketimpangan diharapkan akan berkurang.

Dalam laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2015 yang dikeluarkan oleh BPS diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk di pulau Jawa lebih dari 135 juta penduduk. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 57% penduduk di Indonesia mendiami pulau Jawa. Jumlah penduduk yang besar ini juga tidak merata jumlahnya di provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Proyeksi penduduk tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mendiami provinsi DIY adalah yang paling sedikit jumlahnya dibanding

provinsi lain yaitu sebanyak 3,6 juta jiwa, sementara Jawa Barat memiliki populasi penduduk yang terbanyak sejumlah 43 juta jiwa.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di pulau Jawa tersebut juga memiliki masalah tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional yang menggambarkan salah kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada bulan Agustus tahun 2013 mencatat nilai TPT sebesar 6,25%. Sementara dari data pada tahun yang sama, hanya tiga provinsi di Jawa yang memiliki TPT lebih rendah dibandingkan TPT nasional. Ketiga provinsi tersebut antara lain DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah dengan TPT masing-masing sebesar 3,34%; 4.33%; 6,02%. Tiga provinsi lain yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memiliki TPT lebih besar yaitu masing-masing 9,02%; 9,22%; 9,90% (sumber: www.bps.go.id)

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks ketimpangan yang cukup tinggi dan jumlah PDRB per kapita yang cukup rendah setidaknya tidak memiliki permasalahan pengangguran yang parah dibandingkan provinsi lain. Namun, DKI Jakarta yang memiliki tingkat PDRB per kapita dan indeks ketimpangan yang tinggi masih dibayangi tingkat pengangguran yang tinggi pula. Begitu juga dengan Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa memiliki tingkat pengangguran yang tinggi pula.

Tingginya tingkat pengangguran di beberapa provinsi menjelaskan bahwa masih terdapat faktor produksi yang belum digunakan secara optimal dalam menunjang pembangunan. Rendahnya partisipasi tenaga kerja yang terlihat

dari TPT serta rendahnya PDRB per kapita di beberapa daerah akan berdampak tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang terhambat tentunya akan mempengaruhi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab dalam mengarahkan dan menjalankan pembangunan mengerahkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia, baik sosial maupun ekonomi. Namun kita ketahui bahwa tanggung jawab yang besar atas 34 provinsi di Indonesia ini akan berjalan dengan baik apabila wewenang dan tugas daerah tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat. Penerapan sistem desentralisasi dalam otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sebagai usaha mewujudkan pembangunan yang merata tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dijelaskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Barzelay (dalam Hadi, 2009: 106), peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan merupakan tujuan dari adanya otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal.

Salah satu tolak ukur keberhasilan desentralisasi adalah besarnya nilai derajat desentralisasi fiskal pada suatu daerah. Derajat desentralisasi fiskal dapat mengambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah

dan kemandirian daerah. Tim Fisipol UGM (dalam Hessel, 2007: 83) membagi kemampuan keuangan daerah menjadi enam kategori, dimana daerah dengan derajat desentralisasi fiskal lebih dari 50% memiliki kemampuan keuangan daerah yang sangat baik.

Pada tahun 2013 DIY yang memiliki indeks ketimpangan yang cukup tinggi juga merupakan provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal terendah dibanding lima provinsi lain yaitu sebesar 47%. Sementara itu lima provinsi lain di Pulau Jawa memiliki derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan DIY. DKI Jakarta memiliki derajat desentralisasi fiskal tertinggi sebesar 67,95% diikuti Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masing-masing sebesar 66,75%; 66,11%; 64,25%; dan 61,55%.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang diyakini mampu untuk mengurangi ketimpangan perlu dikaji lebih jauh apakah hal ini juga dapat membawa pengaruh yang positif. Hal ini di dasarkan pada data dimana DIY dan DKI Jakarta yang memiliki indeks Gini tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa ternyata memiliki derajat desentralisasi fiskal dan PDRB per kapita yang terendah dan tertinggi di pulau Jawa.

Secara empiris ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Penelitian Akai dan Sakata (2005) yang dijadikan acuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara PDRB per kapita dan populasi berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian Ulfie (2014) menunjukkan hasil

yang berbeda dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, sementara pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, penelitian Simonsen (2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, begitu juga dengan desentralisasi fiskal.

Indeks Gini yang cukup tinggi di dua provinsi di pulau Jawa serta beberapa pencapaian yang tidak merata mengindikasikan bahwa permasalahan tersebut turut berperan dalam terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Adapun bentuk dari hubungan tersebut perlu diteliti lebih jauh. Apabila aspek-aspek tersebut mampu membawa kebaikan dalam pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan, maka hal ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-2013.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pencapaian PDRB di Indonesia belum merata, dimana PDRB Pulau Jawa menyumbang lebih dari 61% PDB nasional.
2. Laju pertumbuhan ekonomi regional belum merata, dimana laju pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan jumlah PDRB tertinggi di Indonesia masih menyisakan masalah berupa ketimpangan distribusi pendapatan (Indeks Gini) yang melebihi rata-rata nasional di dua provinsinya, yaitu Provinsi DIY dan DKI Jakarta.
4. Distribusi PDRB per kapita di Pulau Jawa belum merata dimana PDRB per kapita DKI Jakarta tujuh kali lebih tinggi dibandingkan dua provinsi lain yaitu DIY dan Jawa Tengah.
5. Populasi penduduk tidak merata di pulau Jawa, dimana populasi penduduk terbanyak berada di Jawa Barat yang juga memiliki TPT lebih tinggi dari rata-rata nasional.
6. Provinsi DIY dan DKI Jakarta dengan Indeks Gini tertinggi di Jawa merupakan provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal dan PDRB per kapita yang rendah (DIY) dan tinggi (DKI Jakarta).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka batasan masalah perlu dilakukan. Hal ini digunakan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Berdasarkan perbedaan kondisi ekonomi dan non ekonomi di setiap provinsi maka penelitian ini difokuskan meneliti empat faktor ekonomi dan non ekonomi yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013 dengan menggunakan data provinsi-provinsi se Jawa. Masalah yang akan diteliti dibatasi pada PDRB per Kapita yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, Populasi Penduduk yang menunjukkan jumlah

penduduk yang menempati suatu wilayah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai gambaran tingkat keparahan pengangguran, dan Derajat Desentralisasi Fiskal yang menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan yang telah diuraikan, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013?
3. Faktor apa saja yang paling besar pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013?
4. Bagaimana pengaruh simultan dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013.
3. Mengetahui faktor apa saja yang paling besar pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013.

4. Mengetahui pengaruh simultan dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013.

F. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada:

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat melengkapi kajian studi mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga dapat dijadikan referensi pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pusat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembangunan Ekonomi

Todaro (2011:18) menjelaskan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, Todaro (2006: 28-29) menjelaskan tiga tujuan inti pembangunan yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok, seperti pangan sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan

membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pendapat yang sama diutarakan oleh Amartya Sen (dalam Todaro, 2006: 22-23) bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*)” adalah yang paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Dari apa yang telah dijelaskan, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi yang penting. Namun pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi. Boediono (1992:1-2) mengartikan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi secara nasional dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk tingkat provinsi atau daerah maka indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDB atau PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh

unit ekonomi. Case dan Fair (2007:21) mengartikan GDP sebagai nilai pasar dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam suatu Negara. Faktor-faktor produksi tersebut adalah tanah, tenaga kerja, dan modal.

PDB dan PDRB dicatat atas harga berlaku dan harga konstan. PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB dan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB/PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (sumber www.bps.go.id).

Teori pertumbuhan ekonomi Harrrod Domar menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional (s), serta rasio modal-output nasional (k). Agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh dengan pesat, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP-nya. Semakin banyak yang ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat (Todaro, 2006: 129).

Teori pertumbuhan neoklasik Solow yang dikemukakan oleh Robert Solow mengembangkan teori Harrod-Domar dengan menambahkan faktor

kedua yaitu tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yaitu teknologi, ke dalam persamaan pertumbuhan (*growth equation*). Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi-rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoritis lainnya diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain (Todaro, 2006:150).

3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Indeks Gini

Simon Kuznets mengatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan cenderung membaik. Observasi tersebut kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”. Beberapa ekonom berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznets tidak dapat dihindari, namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan di masing-masing negara (Todaro, 2006:253-254).

Indeks Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan *complete inequality* atau *perfectly unequal*, di mana seluruh penduduk menempati satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan *perfectly equal*, yaitu penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu negara. Jadi,

semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi (sumber: <http://sirusa.bps.go.id>).

Rumus Indeks Gini atau koefisien Gini diformulasikan dalam rumus di bawah ini:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$$

Keterangan:

- GR : Koefisien Gini
- F_{pi} : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_{ci} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_{ci-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1

Indeks Gini memiliki beberapa kelebihan untuk dijadikan acuan mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, kelebihan tersebut antara lain (Bappeda Kota Semarang, 2012: 7-8):

- a. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.
- b. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).

- c. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.
- d. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pandapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan.

4. PDRB Per Kapita dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kuznet (dalam Lincoln, 2010:292) menjelaskan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya kesenjangan ekonomi diantara warganya. Dalam analisanya Kuznet menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yang menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada tahap tahap berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita.

Penelitian Akai dan Sakata (2005: 14) menunjukkan bahwa PDRB perkapita dan PDRB perkapita kuadrat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut Wie (dalam Litantia, 2010:8) mengatakan bahwa pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat dapat terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratas.

5. Populasi Penduduk dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang mana melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu jumlah penduduk muda dan tua juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah.

Lincoln (2010:338-340) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Lincoln juga menambahkan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Hasil penelitian Akai dan Sakata (2005) menunjukkan bahwa populasi penduduk menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk akan berpengaruh pula pada ketimpangan distribusi pendapatan apabila tidak ada kenaikan produktivitas tenaga kerja.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pengangguran menurut *World Bank* mengacu pada bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan tersedia untuk dan mencari pekerjaan. Case dan Fair (2007:54-55) membagi pengangguran menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran ini merupakan pengangguran yang terjadi karena mekanisme normal pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran ini tidak pernah sama dengan nol, dan mungkin berubah dari waktu ke waktu. Pengangguran ini menunjukkan masalah penyesuaian kerja atau keahlian jangka pendek.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur perekonomian yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan secara signifikan dalam industri tertentu.

c. Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis terjadi selama adanya resesi dan depresi. Hal ini dikarenakan perusahaan berproduksi lebih sedikit.

Sjafrizal (2014:176) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Penelitian Ulfie (2014: 11) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat pengangguran rendah, maka pendapatan per kapita akan meningkat. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di suatu daerah pula.

7. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan

dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan (sumber: www.kemenkeu.go.id)

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbang kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah kesejahteraan masyarakat (sumber <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>).

Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio. Menurut Smith dan Uppal (dalam Hessel, 2007:83) derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menghitung:

- a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).
- b. Rasio sumbangan dan bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah.
- c. Rasio Total Penerimaan Daerah terhadap total penerimaan negara.

Derajat desentralisasi fiskal, khususnya PAD dibandingkan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM dengan menggunakan skala interval, terbagi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0-10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Cukup
30.01-40.00	Sedang
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat baik

Keterangan: PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Penerimaan Daerah

Sumber: Tim Fisipol UGM (dalam Hessel, 2007: 83)

Derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat menggambarkan peran pemerintah dalam mengalokasikan investasi ke daerah yang berhubungan dengan usaha mengurangi ketimpangan. Investasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi modal pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita dan mengurangi pengangguran.

Menurut Barzelay (dalam Hadi, 2009: 106) otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama. Misi tersebut antara lain:

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Penelitian Akai dan Sakata (2005) tersebut membuktikan bahwa desentralisasi fiskal signifikan dapat mengurangi ketimpangan di Amerika Serikat. Desentralisasi fiskal dalam penelitian Sakata diukur dengan empat indikator. Keempat indikator tersebut antara lain adalah *revenue indicator*, *production indicator*, *production-revenue indicator*, dan *autonomy indicator*. Dari ke empat indikator yang menggambarkan derajat desentralisasi fiskal, *autonomy indicator* yang diperoleh dari rasio pendapatan asli daerah dengan total pendapatan menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan, sedangkan indikator lain tidak signifikan.

Pada penelitian Simonsen (2011) diketahui bahwa desentralisasi fiskal justru berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian lain yang dilakukan Ade (2010) menunjukkan hasil yang sama dimana desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian terkait ketimpangan pembangunan antar wilayah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian. Penelitian yang menjadi sumber referensi antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2005) yang berjudul *Fiscal Decentralization, Comitment, and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States*. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara maju menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan *Coefficient of Variation* sebagai variabel terikat

menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal (rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah), PDRB per kapita dan PDRB per kapita kuadrat, jalan raya, aglomerasi penduduk, pendidikan, industri, politik, FDI, dan tingkat pengangguran dipercaya berpengaruh signifikan dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu jumlah populasi penduduk signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lintantia Fajar Apriesa (2013) yang berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan penelitian Akai dan Sakata. Variabel bebas yang berupa pajak daerah dan tenaga kerja secara signifikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang di ukur menggunakan indeks Gini. Sementara variabel lain yang berupa pertumbuhan ekonomi (kenaikan PDRB per kapita) dan jumlah penduduk tidak berpengaruh meskipun kedua variabel ini dipercaya memberikan kontribusi pada ketimpangan. Desentralisasi fiskal yang juga tidak memberikan kontribusi yang nyata dalam penelitian ini.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Simonsen Sianturi (2011) yang berjudul Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara). Indikator ketimpangan yang dijadikan variabel dependen sedikit berbeda pada penelitian ini. Simonsen menggunakan

Indeks Jaime Bonet untuk mengukur ketimpangan. Adapun variabel bebas yang berpengaruh positif dan signifikan antara lain pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, dan aglomerasi. Secara empiris, desentralisasi fiskal pada penelitian ini justru meningkatkan ketimpangan di Sumatra Utara berbeda dengan penelitian Akai dan Sakata (2005). Sementara variabel lain yaitu tenaga kerja dan pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan. Variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfie Efriza (2014) tentang Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Di Era Desentralisasi Fiskal dimana pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat buta huruf, inflasi, dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan. Pada variabel pengangguran, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Akai dan Sakata (2005)

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran arah penelitian, dan dibuat guna memudahkan penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Namun pertumbuhan bukan satu-satunya indikator acuan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nasional pada kenyataannya tidak

merata di seluruh provinsi, khususnya di pulau Jawa. PDRB per kapita yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat belum terdistribusi secara merata. Tidak meratanya distribusi pendapatan inilah yang menyebabkan munculnya ketimpangan distribusi pendapatan, khususnya di pulau Jawa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan telah disampaikan oleh para ekonom dan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Beberapa hasil menunjukkan terdapat beberapa faktor berpengaruh positif dan signifikan, namun tedapat pula hasil yang berpengaruh negatif dan signifikan di daerah lain.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan empat variabel bebas yang akan diujikan pengaruhnya terhadap satu variabel terikat yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Pemilihan variabel bebas tersebut didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, khususnya penelitian Akai dan Sakata (2005) yang dijadikan acuan penelitian oleh peneliti. Variabel bebas tersebut antara lain PDRB per kapita, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan derajat desentralisasi fiskal.

Variabel PDRB per kapita dipilih karena perbedaan perolehan PDRB perkapita sangat besar antar provinsi Pulau Jawa sendiri, dimana provinsi Jawa sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian justru menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Menurut Kuznets pada awal tahap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan cenderung membaik. PDRB per kapita yang menunjukkan distribusi pendapatan

diketahui berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada awal pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Akai dan Sakata juga menunjukkan hasil yang sama dimana PDRB per kapita dan PDRB per kapita kuadrat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

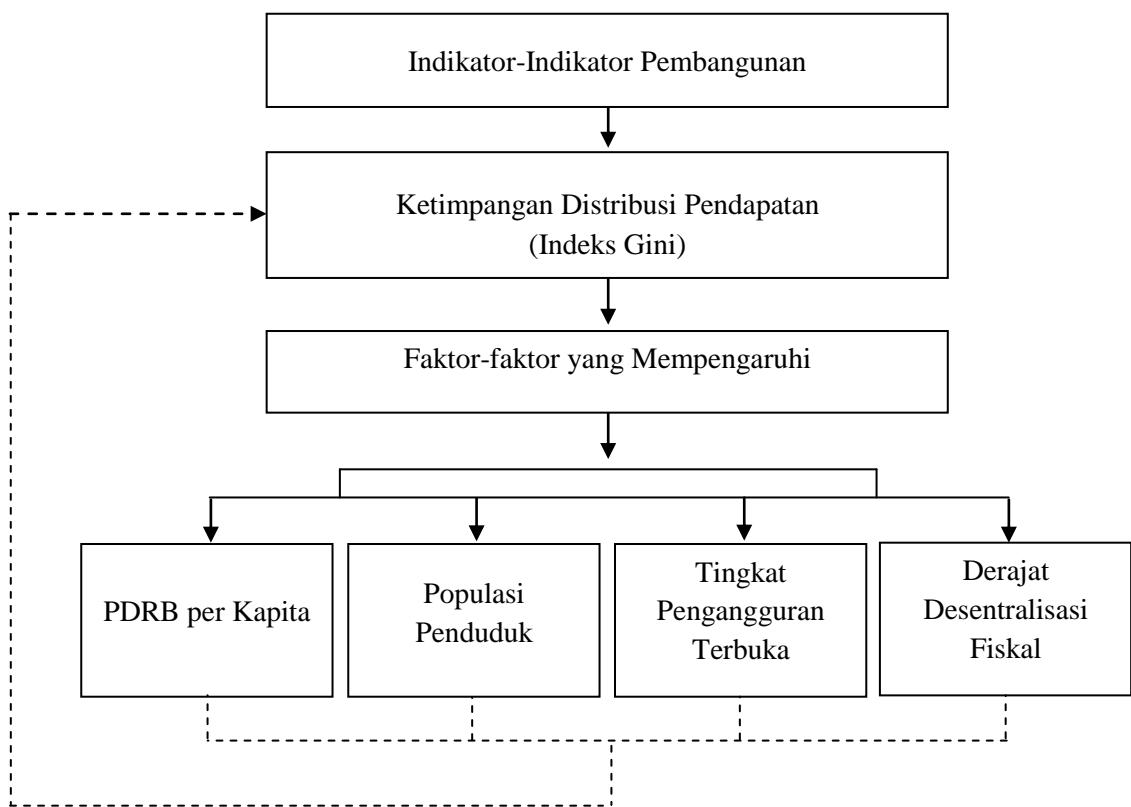
Variabel yang kedua adalah populasi penduduk. Variabel populasi penduduk diambil karena lebih dari limapuluhan persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa, namun di Jawa sendiri penyebaran penduduknya juga tidak merata antar provinsi. Penduduk dipercaya meningkatkan ketimpangan apabila jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi pula.

Faktor pengaruh yang ketiga adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT dipilih sebagai variabel dikarenakan tingkat pengangguran di beberapa provinsi di Jawa masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT nasional, bahkan terdapat provinsi dengan jumlah penduduk tinggi juga memiliki TPT yang juga tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Tingkat pengangguran secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pada penelitian Ulfie (2014) menunjukkan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Variabel keempat adalah derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal dipilih untuk mengetahui seberapa besar peran kebijakan

pemerintah Indonesia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan setelah diimplementasikan lebih dari sepuluh tahun. Desentralisasi fiskal yang merupakan bentuk dari otonomi daerah akan mendorong kemandirian keuangan daerah. Sistem otonomi daerah dipercaya akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Penelitian Akai dan Sakata (2005) menunjukkan hasil yang sama dengan teori tersebut, dimana desentralisasi fiskal yang diperoleh dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini terlihat dalam bagan berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian yang relevan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.
2. Populasi Penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.
4. Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian berupa angka-angka dan analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:14). Berdasarkan tingkat ekplanasi, penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data menggunakan regresi panel dengan data *time series* selama 7 tahun dan data *cross section* 6 provinsi di pulau Jawa, sehingga observasi berjumlah 42 buah.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:61). Dalam penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan menggambarkan distribusi

pendapatan masyarakat di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu yang diukur dari nilai Indeks Gini. Indeks Gini dipakai untuk mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013:61). Dalam penelitian ini variabel independen mengindikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran ekonomi daerah. PDRB per kapita diperoleh dari PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita atas harga konstan. PDRB per kapita dinyatakan dalam rupiah.

b. Populasi Penduduk

Populasi penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami wilayah di provinsi-provinsi di pulau Jawa. Jumlah penduduk diperoleh dari hasil BPS.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT diperoleh dari jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen. Nilai TPT yang digunakan merupakan rata-rata TPT tahunan dari penjumlahan TPT bulan Februari dan Agustus.

d. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Desentralisasi fiskal diperoleh dari pendapatan asli daerah dibagi total penerimaan daerah dikalikan seratus persen.

C. Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data panel, yaitu gabungan dari data *time series* dari tahun 2007-2013 (7 tahun) dan data *cross section* dari 6 provinsi di pulau Jawa. Data yang diperlukan antara lain:

1. Indeks Gini 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2007-2013
2. PDRB per kapita atas harga konstan 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2007-2013
3. Populasi penduduk 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2007-2013

4. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2007-2013
5. Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah di 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2007-2013

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumenter yaitu publikasi BPS secara nasional dan regional yang mencakup 6 provinsi di pulau Jawa dari tahun 2007-2013. Menurut Nana Syaodih (2009:221) studi dokumenter (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis panel data adalah regresi yang menggunakan panel data atau *pool data* yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross section*. Persamaan dasar regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Dimana:

Y_{it}	= variabel terikat (<i>dependent</i>)
X_{it}	= variabel bebas (<i>independent</i>)
i	= <i>cross section</i>
t	= <i>time series</i>

Model dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Akai dan Sakata (2005) yang dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Inequality}_i: \alpha_0 + \alpha_1 \text{Fiscal Decentralization}_I + X_i\beta + \varepsilon_i, I (=1, \dots, 50)$$

Variabel dependen pada penelitian tersebut menggunakan indeks Gini serta *Coefficient of Variation (CV)*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dalam model tersebut adalah desentralisasi fiskal, PDRB per kapita dan PDRB per kapita kuadrat, jalan raya, aglomerasi penduduk, tingkat pendidikan, manufaktur, politik, FDI, tingkat pengangguran, dan populasi penduduk dimana variabel bebas dalam bentuk logaritma natural.

Berdasarkan model penelitian Akai dan Sakata (2005) tersebut, peneliti mengambil empat faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Faktor-faktor tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$IG = f(PDRBPK, POP, TPT, DDF)$$

Model persamaan di atas kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk semi log. Selain mengikuti bentuk model dari Akai dan Sakata (2005), bentuk semi log dipilih karena adanya transformasi dua variabel dalam bentuk logaritma natural yaitu PDRB per kapita dan populasi penduduk. Hal ini bertujuan memperhalus data dimana data PDRB per kapita dan populasi penduduk dalam bentuk ribuan sementara Indeks Gini, TPT, dan derajat desentralisasi fiskal dalam bentuk satuan dan puluhan atau memiliki perbedaan angka yang jauh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut model yang akan dipakai dalam penelitian:

$$IG_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln PDRBPK_{it} + \alpha_2 \ln POP_{it} + \alpha_3 TPT_{it} + \alpha_4 DDF_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

IG : Ketimpangan distribusi pendapatan (diukur dengan

	Indeks Gini)
lnPDRBPK	: ln PDRB per kapita
lnPOP	: ln Populasi penduduk
TPT	: Tingkat pengangguran terbuka
DDF	: Derajat desentralisasi fiskal
α	: Intersep
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$: Koefisien regresi variabel bebas
eit	: Komponen error di waktu t untuk unit cross section i
i	: 1, 2, 3, ..., 6 (data cross-section Provinsi di Jawa)
t	: 1, 2, 3, ..., 7 (data time-series, tahun 2007-2013)

1. Uji Spesifikasi Model

a. Uji *Likelihood Ratio*

Uji *Likelihood Ratio* digunakan untuk memilih model terbaik apakah *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Hipotesis nolnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Pooled Least Square* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect Model*.

Ho: *pooled least square*

Ha: *fixed effect model*

Apabila nilai probabilitas *Likelihood Ratio* lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect Model*, begitu juga sebaliknya.

b. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih model terbaik apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis nolnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect Model*.

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Apabila nilai probabilitas *Hausman* lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect Model*, begitu juga sebaliknya.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dilihat dari nilai probabilitas Jarque-Bera (JB). Apabila nilai probabilitas > 5% maka residual terdistribusi dengan normal.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya

perbedaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Adanya heteroskedastisitas dalam data dapat diketahui dengan uji Park. Uji Park merupakan prosedur dua tahap. Pada tahap pertama kita melakukan regresi OLS dengan mengabaikan heteroskedastisitas. Pada tahap ini kita akan memperoleh \hat{u}_i^2 . Tahap kedua kita melakukan regresi dengan menggunakan $\log\hat{u}_i^2$ sebagai variabel terikatnya. Apabila β atau probabilitas secara statistik signifikan, maka heteroskedastisitas terjadi pada data. Jika tidak signifikan maka asumsi homoskedastisitas diterima (Gujarati, 2004:404)

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Uji autokorelasi yang paling sederhana adalah menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Hasil pengujian ditentukan sebagai berikut (Gujarati, 2004:470):

Tabel 4. Indikator Hasil Uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi, baik positif atau negatif	Terima	$dU < d < 4 - dU$

d. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas keberadaan dari hubungan linier yang sempurna atau tepat, diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Mengikuti *rule of thumb*, apabila koefisien antar variabel lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2004: 359)

3. Uji statististik

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebasnya secara serentak terhadap variabel terikatnya. Uji F dapat dilakukan dengan mambandingkan nilai probabilitas F. Apabila nilai prob F < taraf signifikansi artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob F > taraf signifikansi artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara parsial terhadap variabel terikatnya. Uji t dapat dilakukan dengan mambandingkan nilai probabilitas t. Apabila nilai probabilitas t < taraf signifikansi artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob. t > taraf signifikansi artinya variabel

bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Adjusted R² atau *goodness of fit* digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat.

Adjusted R² digunakan karena nilai yang diperoleh merupakan nilai R^2 yang telah dikoreksi sehingga hasilnya tidak bias.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil analisis data yang menjadi tujuan penelitian. Pembahasan hasil penelitian terdiri dari deskripsi data dan hasil estimasi data panel yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-2013.

A. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Indeks Gini (IG), PDRB per kapita (PDRBPK), populasi penduduk (POP), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan derajat desentralisasi fiskal (DDF) dari 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2007-2013.

Di bawah ini merupakan statistik deskriptif data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 5 Statistik Deskriptif Data Penelitian

Variabel	Obs	Min	Max	Mean	Median	Std. Dev
Indeks Gini	42	0,310	0,440	0,373	0,365	0,035
PDRB per Kapita (ribuan)	42	4.960	47.872	13.105,74	7.875,5	13.047,2
Populasi penduduk (ribuan)	42	33.66,9	45.340,8	22.850,41	21.790,40	3366.900
TPT (%)	42	3,570	15,930	8,720	8,480	15604.51
Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	42	37,410	77,420	64,242	66,980	9,820

Sumber: Lampiran 2

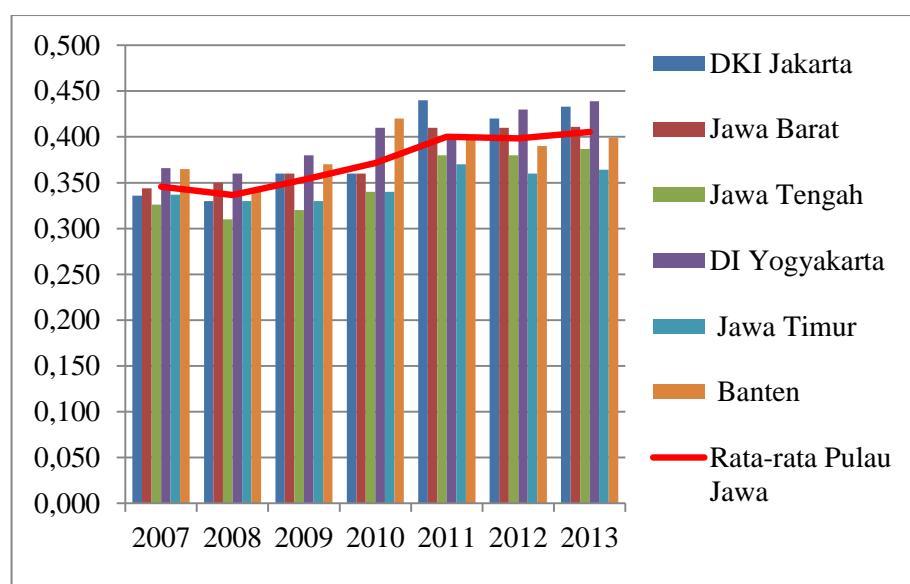
Dari tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Gini

Indeks Gini sebagai variabel terikat dalam penelitian yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama kurun waktu 2007-2013 menunjukkan rata-rata ketimpangan sebesar 0,373. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Indeks Gini terendah dicapai pada tahun 2008 di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,310 atau masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Pada tahun 2011 Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi se Jawa selama kurun waktu 2007-2013 yaitu sebesar 0,44.

Perkembangan Indeks Gini provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: BPS, 2014 (diolah)

Gambar 2. Perkembangan Indeks Gini Provinsi se Jawa

Dari gambar 2 diketahui bahwa Indeks Gini provinsi-provinsi di Pulau Jawa berada pada kisaran ketimpangan rendah dan sedang. Meskipun tidak mencapai kondisi ketimpangan yang tinggi yaitu lebih dari 0,5 namun Indeks Gini menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Rata-rata Indeks Gini Pulau Jawa dari tahun 2007-2013 diketahui masing-masing sebesar 0,34; 0,33; 0,35; 0,37; 0,40; 0,39; dan 0,406. Meskipun sempat mengalami perbaikan yaitu menurun pada tahun 2008, namun ketimpangan kembali meningkat di tahun-tahun setelahnya hingga pada tahun 2013 mencapai angka 0,406.

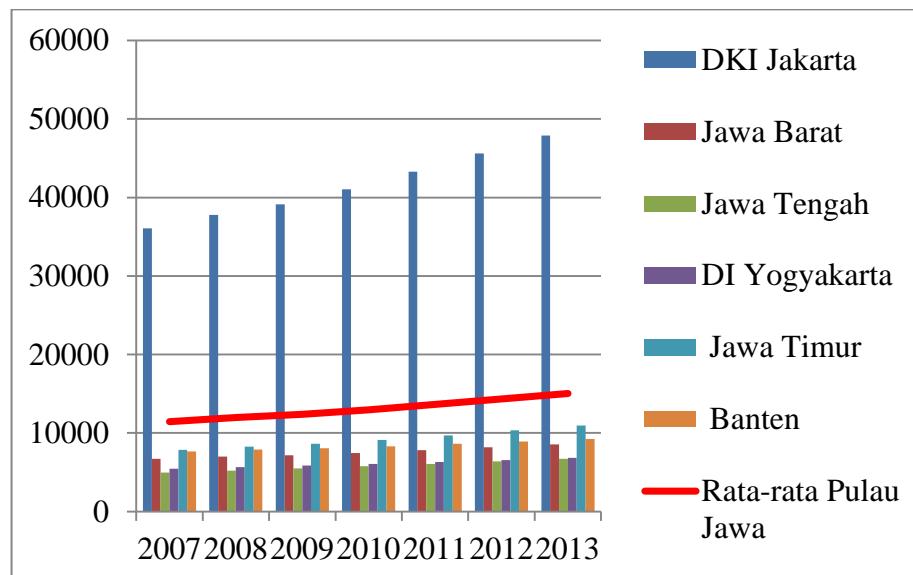
Pada tahun 2012 dan 2013, provinsi dengan Indeks Gini tertinggi yang juga melebihi rata-rata se Jawa adalah Provinsi DIY dan DKI masing-masing sebesar 0,43 dan 0,439 serta 0,42 dan 0,433. Pada tahun yang sama Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah provinsi dengan ketimpangan terendah, dan selama periode 2007-2013 hanya dua provinsi tersebut yang mampu menekan Indeks Gini dibawah rata-rata Indeks Gini se Jawa.

DKI Jakarta yang memiliki intensitas perekonomian yang tinggi dibanding lima provinsi lain menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi skala besar yang ada di provinsi tersebut justru membuat gap antara penduduk kaya dan miskin semakin jelas. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan tidak menjadi jaminan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat di provinsi tersebut menjadi lebih merata.

2. PDRB per Kapita

Selama kurun waktu 2007-2013 rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp 13,105 juta. PDRB per kapita tertinggi diperoleh provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar Rp 47,872 juta sementara capaian terendah PDRB per kapita terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 4,96 juta.

Perkembangan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber: BPS, 2014 (diolah)

Gambar 3. Perkembangan PDRB per Kapita se Jawa (ribuan)

Dari gambar 3 diketahui bahwa tren rata-rata PDRB per kapita di Pulau Jawa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data ini mengindikasikan bahwa seiring dengan pertumbuhan PDRB per kapita, produktivitas penduduk di Jawa lebih besar dibandingkan dibandingkan pertumbuhan penduduknya. Sementara untuk laju pertumbuhan PDRB per kapita sendiri, capaian pertumbuhan tertinggi

pada tahun 2013 terjadi di Jawa Timur dengan pertumbuhan sebesar 5,83% dan terendah berada di Provinsi Banten sebesar 3,53% dimana rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Pulau Jawa sebesar 4,80%.

Meskipun menunjukkan peningkatan yang positif, masih terlihat terjadinya perbedaan pendapatan per kapita antar provinsi yang sangat timpang. PDRB per kapita DKI Jakarta selalu berada di atas rata-rata PDRB per kapita se Jawa dan memimpin jauh dibanding lima provinsi lain. Selain tingginya PDRB per kapita, sumbangannya PDRB DKI Jakarta merupakan yang terbesar dalam pembentukan PDRB Pulau Jawa dengan rata-rata sumbangannya lebih dari 29%. Tingginya pembentukan PDRB DKI Jakarta terhadap PDRB Pulau Jawa ini didukung oleh tiga sektor perekonomian utama yaitu keuangan, real estate, dan jasa perusahaan (sektor 8), perdagangan, hotel, dan restaurant (6), serta pengangkutan dan komunikasi (sektor 7).

Jawa Tengah sebagai provinsi dengan PDRB per kapita terendah selama periode penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita provinsi tersebut tujuh kali lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. DIY sebagai provinsi dengan PDRB per kapita terendah kedua memiliki sumbangannya PDRB paling sedikit terhadap pembentukan PDRB Pulau Jawa yaitu kurang dari 2%.

Jumlah penduduk DKI Jakarta yang tidak lebih dari tiga kali penduduk DIY menghasilkan PDRB lebih dari sembilan belas kali PDRB DIY. Data ini menunjukkan bahwa produktivitas penduduk dan

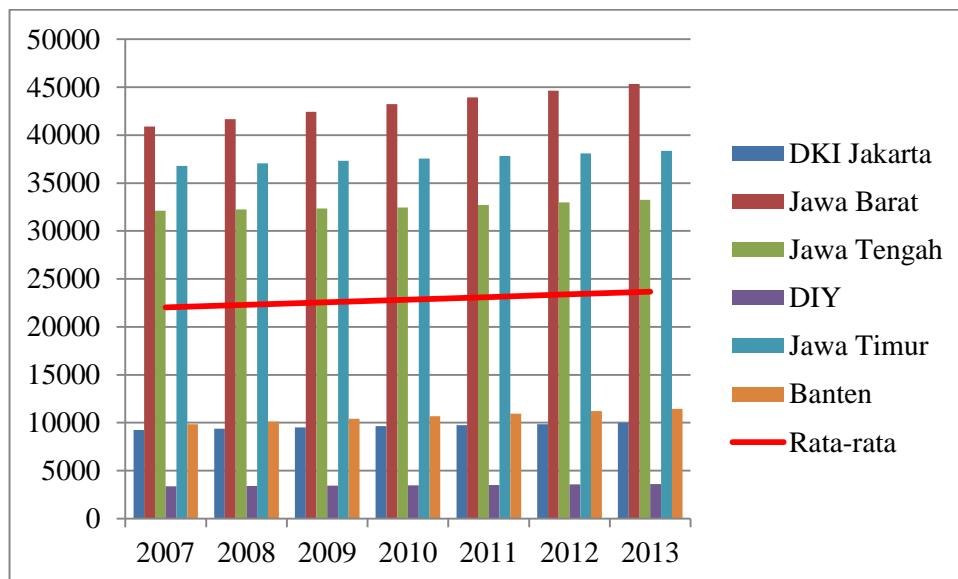
intensitas kegiatan ekonomi Provinsi DIY sangat jauh di bawah provinsi lain, khususnya DKI Jakarta. Data lain menunjukkan bahwa DIY tidak memiliki sektor unggul yang mampu mendukung perekonomiannya. Hanya sektor perdagangan, hotel, dan restaurant (sektor 6), jasa-jasa (sektor 9), serta pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (sektor 1) yang memiliki persentase paling tinggi sebagai penyokong perekonomian, namun sayangnya angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan lima provinsi lain.

Salah satu alasan rendahnya capaian PDRB tersebut adalah skala industri, dimana provinsi lain memiliki industri skala besar dan modern yang lebih banyak di banding DIY, khususnya Jakarta. Sementara untuk sektor pertanian, meskipun merupakan salah satu penyokong utama perekonomian DIY, persentase pencapaian DIY masih tertinggal jauh dari Jawa Timur. Jawa Timur dengan PDRB per kapita tertinggi kedua merupakan provinsi dengan kontribusi di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang paling besar se Jawa.

3. Penduduk

Selama kurun waktu 2007-2013 rata-rata jumlah penduduk di Pulau Jawa sebanyak 22,5 juta jiwa dimana jumlah penduduk tertinggi terdapat pada tahun 2013 di Provinsi Jawa Barat sejumlah 43,7 juta jiwa. Jumlah penduduk terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2007 yaitu sejumlah 3,4 juta jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 4.



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Gambar 4. Perkembangan jumlah penduduk se Jawa (Ribuan)

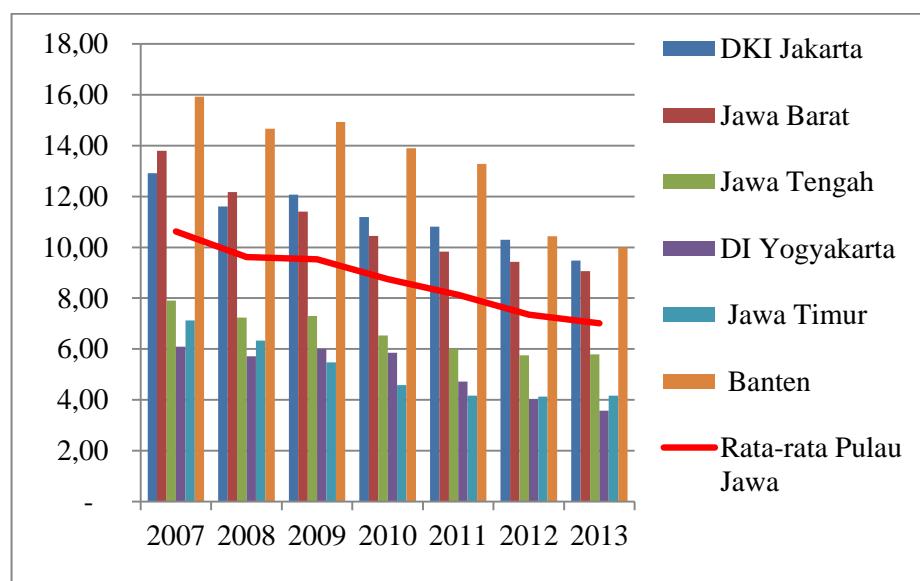
Dari gambar 4 diketahui tren rata-rata jumlah penduduk Pulau Jawa terus meningkat meskipun jumlahnya tidak signifikan. Bila dilihat dari persentase pertumbuhan penduduk, rata-rata pertumbuhan penduduk megalami penurunan dimana pertumbuhan penduduk tahun 2008 sebesar 1,2% dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2013 pertumbuhan sebesar 1,16%.

Selama periode 2007-2013 diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi dibanding lima provinsi lain dengan jumlah penduduk tahun 2013 merupakan yang terbanyak dengan laju pertumbuhan penduduk di atas rata-rata se Jawa yaitu sebesar 1,56%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama kurun waktu 2007-2013 rata-rata TPT Pulau Jawa sebesar 8,72% dengan TPT tertinggi pada tahun 2007 di Provinsi Banten sebesar 15,93%. TPT terendah dicapai Provinsi DIY pada tahun 2013 sebesar 3,57%.

Perkembangan TPT provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 5.



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Gambar 5. Perkembangan TPT se Jawa

Dari gambar 5 diketahui perkembangan yang positif terhadap TPT, baik rata-rata se Jawa maupun tingkat provinsi. Meskipun perkembangan TPT positif, namun tiga provinsi di Jawa yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat masih memiliki TPT yang melebihi rata-rata se Jawa.

Jawa Barat dengan jumlah penduduk tertinggi dan dengan TPT yang melebihi rata-rata se Jawa menunjukkan bahwa penanganan

terhadap masalah kependudukan dan ketenagakerjaan belum seoptimal provinsi yang lain. Sementara DKI Jakarta dengan PDRB per Kapita tertinggi dan TPT yang juga tinggi menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil penduduk yang bekerja yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi selebihnya merupakan penduduk yang bekerja dengan penghasilan yang rendah.

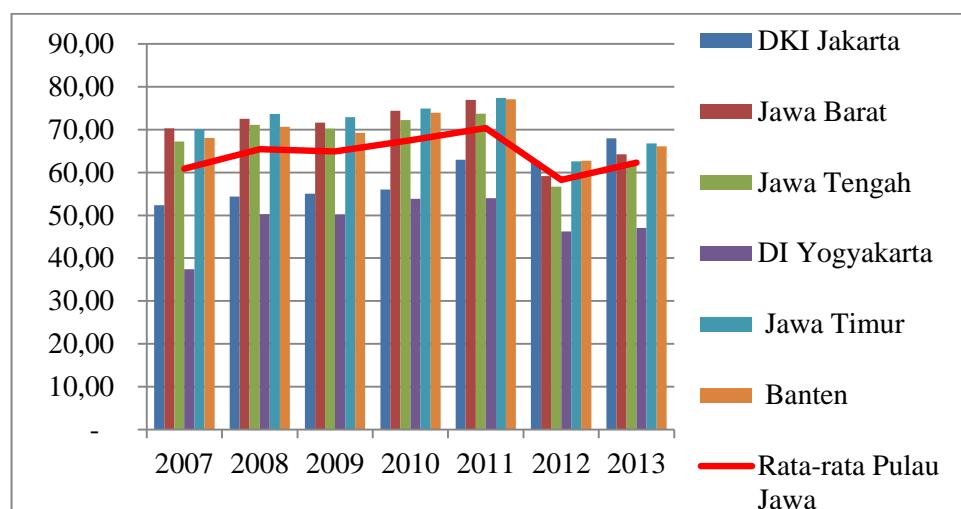
Banten selama periode penelitian diketahui merupakan provinsi dengan TPT tertinggi. Pada tahun 2013, jumlah pengangguran tertinggi adalah tenaga kerja tamatan SMA sejumlah 209.836 orang diikuti SMP sejumlah 127.702 orang. Data ini menunjukkan bahwa penduduk dengan latar belakang pendidikan menengah lebih sulit bersaing dengan lulusan perguruan tinggi dimana pengangguran lulusan perguruan tinggi hanya sejumlah 31.346 orang. Hal yang sama juga terlihat pada provinsi dengan TPT tinggi yaitu DKI Jakarta dimana pengangguran terbuka tertinggi adalah lulusan SMA dan SMP. Data ini menunjukkan bahwa keterampilan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan dapat menjadi pertimbangan untuk memasuki dunia kerja yang mana tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dipercaya lebih terampil dibandingkan lulusan sekolah menengah.

5. Derajat Desentralisasi Fiskal

Selama periode 2007-2013 diketahui bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal di Pulau Jawa sebesar 64,24% atau termasuk dalam kategori sangat baik menurut Tim Fisipol UGM (Hessel, 2007:

83). Derajat desentralisasi fiskal tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 77,42% atau dalam kategori sangat tinggi. Pada tahun 2007 DIY merupakan provinsi dengan derajat desentralisasi fiskal terendah sebesar 37,41% atau dalam kategori sedang.

Perkembangan derajat desentralisasi fiskal provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 6.



Sumber:BPS, 2014 (diolah).

Gambar 6. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal se Jawa

Dari gambar 6 diketahui derajat desentralisasi fiskal Provinsi DIY selama periode penelitian merupakan yang terendah dibanding lima provinsi lain. Selama tahun 2008-2011, Jawa Timur merupakan provinsi dengan perolehan derajat desentralisasi fiskal tertinggi, dan pada dua tahun terakhir derajat desentralisasi fiskal Provinsi Banten dan DKI Jakarta adalah yang tertinggi.

Perkembangan derajat desentralisasi fiskal tahun 2008 naik dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2009 derajat desentralisasi fiskal semua provinsi di Jawa menurun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya refomulasi dana perimbangan. Reformulasi ini dilakukan dalam rangka memperbaiki *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*. Peningkatan ini menjadikan rasio dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah sebagai unsur pembagi dalam menentukan derajat desentralisasi fiskal meningkat, sehingga rasio PAD terhadap total penerimaan daerah terlihat menurun meskipun penerimaan PAD meningkat.

Tahun 2012 derajat desentralisasi fiskal menurun drastis dimana rata-rata penurunan se Jawa mencapai 17,18%. Penurunan paling tinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penyebab penurunan ini masih sama dengan tahun 2009 dimana rasio dana perimbangan meningkat dan lebih besar dari pada tahun 2009. Naiknya bantuan pusat lewat dana perimbangan memiliki sisi positif dan negatif. Segi positifnya daerah memiliki dana tambahan untuk alokasi belanja daerah. Namun, alokasi ini jika tidak digunakan dengan baik akan membawa dampak negatif, contohnya alokasi belanja digunakan untuk belanja pegawai bukan belanja modal. Sisi negatif lainnya adalah ketergantungan daerah terhadap pusat menjadi meningkat, dan kemandirian daerah menjadi sulit dicapai padahal tujuan dari otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

B. Estimasi Model

Mengacu pada penelitian Akai dan Sakata (2005) dengan mengambil empat variabel dalam penelitian sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013, maka model penelitian yang akan diestimasi sebagai berikut:

$$IGit = \alpha_0 + \alpha_1 \ln PDRBPKit + \alpha_2 \ln POPIt + \alpha_3 TPTIt + \alpha_4 DDFIt + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

IG	: Ketimpangan distribusi pendapatan (diukur Indeks Gini)
PDRBPK	: PDRB per kapita
POP	: Populasi penduduk
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
DDF	: Derajat Desentralisasi Fiskal
α	: Intersep
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$: Koefisien regresi variabel bebas
ε_{it}	: Komponen error di waktu t untuk unit <i>cross section i</i>
i	: 1, 2, 3, ..., 6 (data <i>cross-section</i> Provinsi di Jawa)
t	: 1, 2, 3, ..., 7 (data <i>time-series</i> , tahun 2007-2013)

Untuk mengetahui model terbaik maka dilakukan dua pengujian, yaitu uji *Likelihood ratio* dan uji *Hausman*.

1. Uji *Likelihood Ratio*

Uji *Likelihood ratio* digunakan untuk memilih antara *pooled least square* atau *fixed effect model*. Adapun hipotesis dari pengujian ini sebagai berikut:

Ho: *pooled least square*

Ha: *fixed effect model*

Nilai probabilitas hasil pengujian sebesar 0,00. Nilai probabilitas lebih kecil dari taraf sigifikansi 0,05 sehingga H_0 ditolak atau dengan kata lain model yang terpilih adalah *fixed effect* (lampiran 3).

2. Uji *Hausman*

Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara *random effect model* atau *fixed effect model*. Adapun hipotesis dari pengujian ini sebagai berikut:

H_0 : *random effect model*

H_a : *fixed effect model*

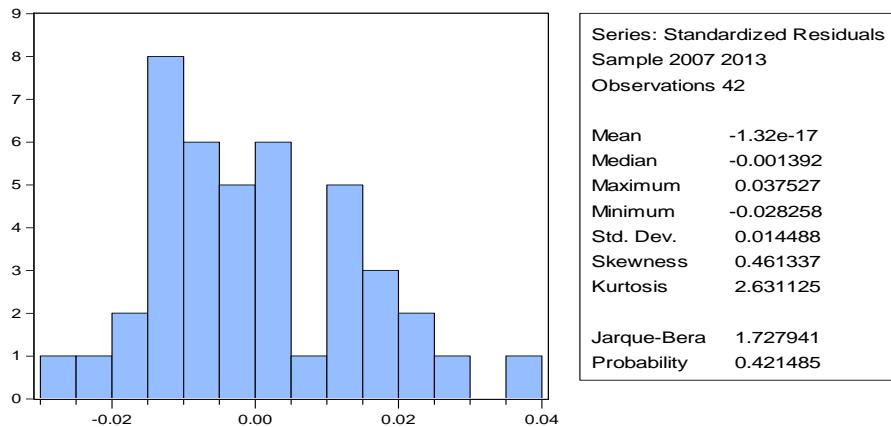
Nilai probabilitas hasil pengujian sebesar 0,00. Nilai probabilitas lebih kecil dari taraf sigifikansi 0,05 sehingga H_0 ditolak atau dengan kata lain model yang terpilih adalah *fixed effect* (lampiran 3).

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan hasil estimasi tidak bias. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Keputusan diambil dengan melihat nilai probabilitas Jarque-Bera. Apabila probabilitas $Jarque-Bera > 5\%$ maka data berdistribusi normal.



Sumber: Lampiran 4.

Gambar 7. Hasil Uji Normalitas

Nilai probabilitas J-B diperoleh sebesar 0,421485 atau lebih besar dari 5%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya perbedaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Probabilitas hasil regresi residual kuadrat sebesar 0.976879 atau lebih besar dari 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model (Lampiran 5).

3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui keberadaan dari hubungan linier yang sempurna atau tepat, diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Variabel dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila bernilai kurang

dari 0,8. Hasil pengujian multikolinearitas pada model dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	LNPDRBPK	LNPOP	TPT	DDF
LNPDRBPK	1.000000	-0.168265	0.334212	-0.132585
LNPOP	-0.168265	1.000000	-0.013965	0.726888
TPT	0.334212	-0.013965	1.000000	0.263203
DDF	-0.132585	0.726888	0.263203	1.000000

Sumber: Lampiran 6

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien korelasi semua variabel bebas kurang dari 0,8. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Uji Durbin-Watson (DW) menunjukkan nilai sebesar 2.087088. Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan $t=42$ (jumlah observasi) dan $k=4$ (jumlah variabel bebas) diketahui nilai $d_L = 1,17049$ dan $d_U = 1,46375$. Dari tabel diketahui nilai d hitung lebih besar dari d_U dan lebih kecil dari $4-d_U$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi (Lampiran 7).

D. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Pada sub bab ini akan dijelaskan hasil estimasi model, secara simultan maupun parsial. Berikut hasil estimasi model penelitian.

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel

Variabel Terikat: Indeks Gini	
Variabel Bebas	FEM
Constanta	-8,723781***
	2,412035
LNPDRBPK	0,278708***
	(0,052485)
LNPOP	0,656604**
	(0,244590)
TPT	0,013688**
	(0,005869)
DDF	0,000775*
	(0,000493)
R-squared	0,832860
Adjusted R-squared	0,785852
S.E. of regression	0,016400
F-statistic	17,71734
Prob(F-statistic)	0,000000

Keterangan : *** signifikan pada 1%; ** signifikan pada 5%; * signifikan pada 10%

(Sumber: Lampiran 8)

Berdasarkan tabel 7, model estimasi yang terpilih yaitu *fixed effect model* menunjukan bahwa LnPDRBPK, LnPENDDK, dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara DDF tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Dalam penelitian ini, PDRB per kapita dan penduduk bernilai positif dan signifikan. Hasil ini mendukung hasil temuan Akai dan Sakata (2005) dimana pada penelitian tersebut ditemukan bahwa PDRB per Kapita dan PDRB per Kapita kuadrat serta populasi atau jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan. TPT dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan,

berbeda dengan penelitian Akai dan Sakata (2005) dimana pada penelitian tersebut tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan.

Derajat desentralisasi fiskal pada penelitian ini ditemukan bahwa derajat desentralisasi fiskal bernilai positif namun tidak signifikan. Hasil ini melawan penemuan Akai dan Sakata (2005) dimana pada penelitian tersebut derajat desentralisasi fiskal justru bernilai negatif dan signifikan.

E. Hasil Uji Signifikansi

Penjelasan hasil pengujian lebih lanjut mengenai uji simultan (Uji F), uji parsial (Uji t), dan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dijelaskan di bawah ini.

1. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa F hitung sebesar 17,71734 dengan probabilitas F sebesar 0,0000. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas F lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menjelaskan bahwa secara bersama-sama, variabel bebas yaitu PDRB per kapita, penduduk, TPT, dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

2. Uji Parsial

a. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel PDRB per Kapita (X1) sebesar 0,278708 dengan probabilitas sebesar 0,0000.

Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB per Kapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya kenaikan 1% PDRB per kapita akan diikuti kenaikan distribusi pendapatan sebesar 0,27%.

b. Pengaruh Penduduk terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel Penduduk (X_2) sebesar 0,656604 dengan probabilitas sebesar 0,0114. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa Penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya kenaikan 1% jumlah penduduk akan diikuti kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,65%.

c. Pengaruh TPT terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel TPT (X_3) sebesar 0,013688 dengan probabilitas sebesar 0,0261. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa TPT memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya kenaikan 1% TPT

akan diikuti kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,013%.

d. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel derajat desentralisasi fiskal (X_4) sebesar 0,000775 dengan probabilitas sebesar 0,1258. Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih besar dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

3. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) atau *goodness of fit* sebesar 0,785852. Hal ini mengartikan bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 78%. Sisa sebesar 22% dijelaskan variabel lain di luar model.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel PDRB per kapita, penduduk, TPT, dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dari hasil regresi data panel dengan *fixed effect model* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IGit} = & -8,723781 + 0,278708 \ln \text{PDRBPKit} + 0,656604 \ln \text{POPit} + \\ & 0,013688 \text{TPTit} + 0,000775 \text{DDFit} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

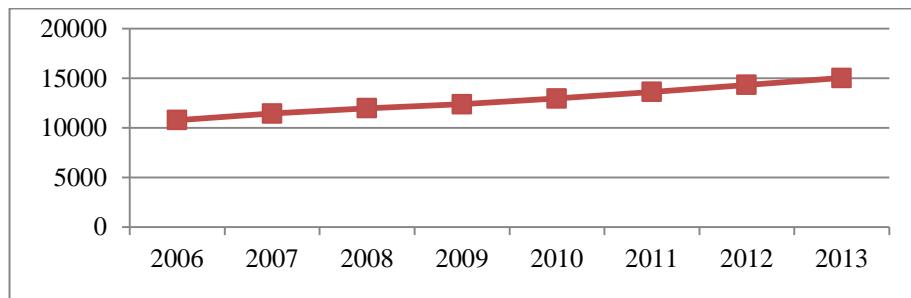
Pada persamaan regresi di atas diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar -8,723781. Nilai negatif dalam konstanta menunjukkan bahwa diluar empat variabel bebas yang dipilih dalam penelitian terdapat variabel-variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian, akibatnya variabel-variabel tersebut mempengaruhi konstanta menjadi negatif.

Dari empat variabel bebas yang yang diujikan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah populasi penduduk. Populasi penduduk berpengaruh paling besar dengan koefisien sebesar 0,656604 pada taraf signifikansi 5%.

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dijelaskan di bawah ini.

1. PDRB per Kapita

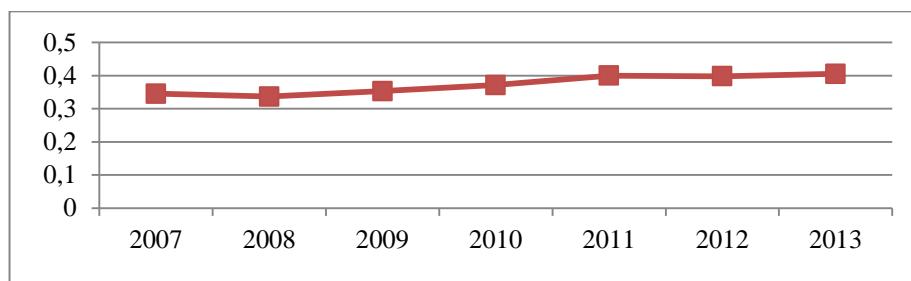
Hasil menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien variabel PDRB per Kapita (X1) sebesar 0,278708 dengan probabilitas sebesar 0,0000 menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% PDRB per kapita akan diikuti kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,27%. Hasil ini mendukung penelitian Akai dan Sakata (2005) dimana PDRB per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.



Sumber: BPS, berbagai terbitan (diolah)

Gambar 8. Rata-rata Kenaikan PDRB per kapita se Jawa (ribuan)

Dari gambar 8 diketahui bahwa PDRB per kapita rata-rata se Jawa memiliki tren naik dengan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,27%. Pada periode yang sama, rata-rata indeks Gini juga mengalami kecenderungan meningkat.



Sumber: BPS, berbagai terbitan (diolah)

Gambar 9. Rata-rata Kenaikan Indeks Gini se Jawa

Pada gambar 9 terlihat bahwa pada tahun 2008 rata-rata indeks Gini tercatat turun pada angka 0,336 meskipun begitu grafik menunjukkan rata-rata indeks Gini se Jawa memiliki kecenderungan naik. Kenaikan ini sejalan dengan naiknya rata-rata penerimaan PDRB per kapita se Jawa.

Meskipun PDRB per Kapita dinilai dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat, pada hasil penelitian ini menjelaskan hasil yang berbeda. PDRB per kapita yang merupakan rata-rata

pendapatan penduduk dimungkinkan tinggi karena terdapat sejumlah orang yang berpenghasilan sangat tinggi di dalam suatu wilayah. Selain itu, perbedaan pendapatan dari suatu sektor ekonomi dapat menjadi penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Pada tabel 8 terlihat sumbangannya per sektor lapangan usaha se Jawa terhadap pembentukan PDRB.

Tabel 8. Persentase Pembentukan PDRB per Sektor Lapangan Usaha

Sektor Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	10.67	10.20	9.74	6.37	9.04
2. Pertambangan dan Penggalian	1.38	1.36	1.30	1.25	1.16
3. Industri Pengolahan	29.52	28.76	28.59	28.91	27.67
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.43	1.44	1.41	1.46	1.41
5. Bangunan	5.76	6.32	5.95	6.23	6.08
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	23.19	23.71	24.23	25.71	25.23
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7.44	7.84	8.32	8.93	8.95
8. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	11.40	11.21	11.23	11.57	11.20
9. Jasa-Jasa	9.21	9.17	9.23	9.57	9.27

Sumber: BPS, 2009-2013(diolah)

Dari tabel 8 ketahui bahwa Indonesia sebagai negara agraris dan maritim ternyata sumbangannya sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (sektor 1) khususnya di Pulau Jawa tidak mendominasi sebagai sektor yang menyumbang PDRB terbesar. Sumbangan sektor 1 pada tahun 2012 menurun cukup drastis hingga mencapai 32% dari tahun 2011. Meskipun pada tahun 2013 mengalami perbaikan, tetapi kenaikan ini masih rendah dari tahun sebelumnya. Tren ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran sektor usaha di Pulau Jawa.

Sektor 3 atau sektor manufaktur merupakan sektor yang menyumbang PDRB terbesar se Jawa. Tingginya kontribusi sektor ini sejalan dengan laporan Bank Dunia. Pada tahun 2012 Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul “Mempercepat Laju: Revitalisasi Pertumbuhan di Sektor Manufaktur Indonesia” menyatakan bahwa Indonesia akan mendapat keuntungan dari industri pengolahan atau manufaktur. Keuntungan dari bangkitnya industri manufaktur tersebut antara lain pertumbuhan yang berkualitas, pekerjaan yang lebih layak, dan pengurangan kesenjangan gender.

Namun sayangnya, penyerapan tenaga kerja di sektor 3 belum merata. Berikut persentase penyerapan tenaga kerja per sektor se Jawa pada tahun 2013.

Tabel 9. Persentase Penyerapan tenaga kerja per sektor lapangan usaha tahun 2013.

Sektor Lapangan Usaha	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	0,33	19,93	30,86	27,86	37,44	14,99
2. Pertambangan & Penggalian	0,34	0,75	0,42	0,48	0,63	1,06
3. Industri Pengolahan	14,48	21,27	19,07	13,45	14,40	25,91
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,15	0,34	0,13	0,28	0,15	0,34
5. Bangunan	3,81	6,87	5,95	5,55	5,43	5,17
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	35,29	25,63	22,46	25,98	21,01	23,60
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,11	5,58	3,78	3,49	3,50	6,61
8. Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	10,03	2,92	1,97	2,90	1,81	5,37
9. Jasa-Jasa	26,46	16,70	15,36	20,00	15,63	16,94

Sumber: BPS, 2014 (diolah)

Dari tabel 9 diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja sektor industri terbesar terdapat di Jawa Barat sebesar lebih dari 3,9 juta

tenaga kerja (21,27%), sementara Provinsi DIY penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut sangat rendah hanya sebesar 248.473 tenaga kerja (2,9%).

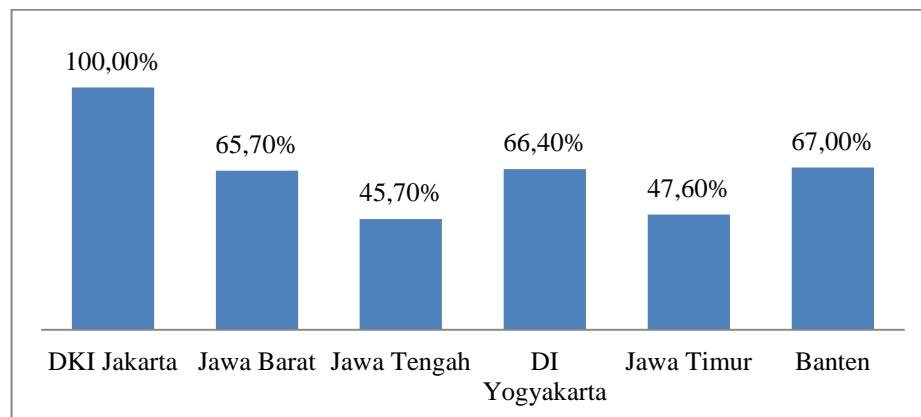
Di beberapa provinsi, tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor 1 yang memiliki PDRB lebih rendah di bandingkan sektor 3 mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor 3. Data ini mendukung penyataan di awal bahwa kenaikan PDRB per kapita belum mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat di Jawa dimana pendapatan yang tinggi hanya didominasi oleh sebagian kecil masyarakat.

2. Populasi Penduduk

Hasil menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial populasi penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Koefisien variabel Penduduk (X_2) sebesar 0,656604 dengan probabilitas sebesar 0,0114 menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% penduduk akan diikuti kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,65%. Hasil ini mendukung penelitian Akai dan Sakata (2005) dimana jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Jumlah penduduk dapat menjadi faktor yang meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan apabila sebaran populasi penduduk tidak merata. Tidak meratanya jumlah penduduk yang menempati

wilayah tertentu akan turut mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut.



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Gambar 10. Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi Tahun 2010

Berdasarkan gambar 10, pada tahun 2010 diketahui bahwa setengah penduduk di Pulau Jawa tinggal di daerah perkotaan. Hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki persentase penduduk kota lebih rendah dari desa yaitu masing-masing sebesar 47,6% dan 45,7%.

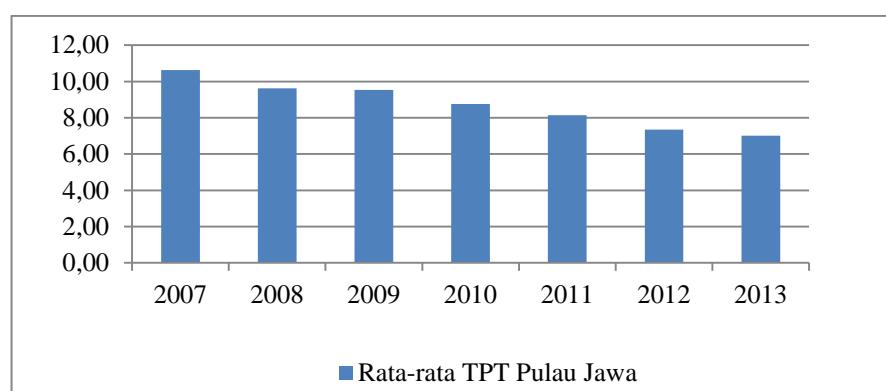
Estudillo (1997: 65) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan merupakan kombinasi dari pendapatan masyarakat kota dan desa, dimana umumnya pendapatan masyarakat kota lebih besar dikarenakan keanekaragam kegiatan kelompok masyarakat di perkotaan. Meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan akan membuat ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar. Selain itu, meningkatnya penduduk yang terampil dan terpelajar yang bermigrasi ke kota menjadikan desa kekurangan SDM handal yang justru diharapkan mampu membangun perekonomian desa.

3. TPT

Hasil menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan TPT berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Koefisien variabel TPT (X3) sebesar 0,013688 dengan probabilitas sebesar 0,0261. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% TPT akan diikuti kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,013%.

Hasil ini tidak seperti penelitian Akai dan Sakata (2005) dimana tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan. Pada penelitian ini menunjukkan hubungan positif bahwa meningkatnya TPT dipercaya berpengaruh terhadap kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan, begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ulfie (2014) dimana pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa upah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil.



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

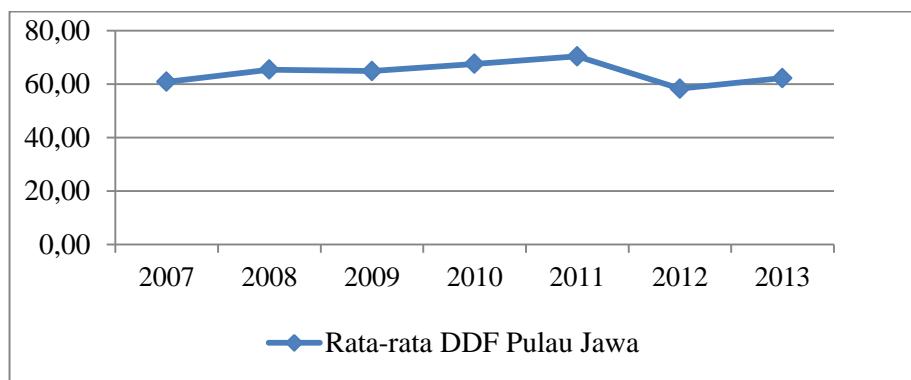
Gambar 11. Perkembangan Rata-rata TPT Pulau Jawa

Dari gambar 11 menunjukkan bahwa rata-rata TPT Pulau Jawa terus mengalami penurunan. Turunnya TPT diasumsikan semakin banyak faktor produksi yaitu tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini pada akhirnya akan memberikan pemasukan kepada masyarakat.

Menurunnya TPT juga mengindikasikan semakin banyaknya penerima pendapatan di masyarakat, meskipun gaji maupun upah yang diterima tidak sama di setiap daerah. Semakin banyaknya masyarakat yang bekerja dan menerima pendapatan diharapkan mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan yang ada.

4. Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil menunjukkan bahwa secara parsial Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien variabel derajat desentralisasi fiskal (X_4) sebesar 0,000775 dengan probabilitas sebesar 0,1258. Hasil penelitian ini melawan hasil penelitian Akai dan Sakata (2005) dan juga teori yang mengatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian Lintantia (2013) menunjukkan hasil yang sama dimana desentralisasi fiskal memiliki arah yang positif namun tidak signifikan.

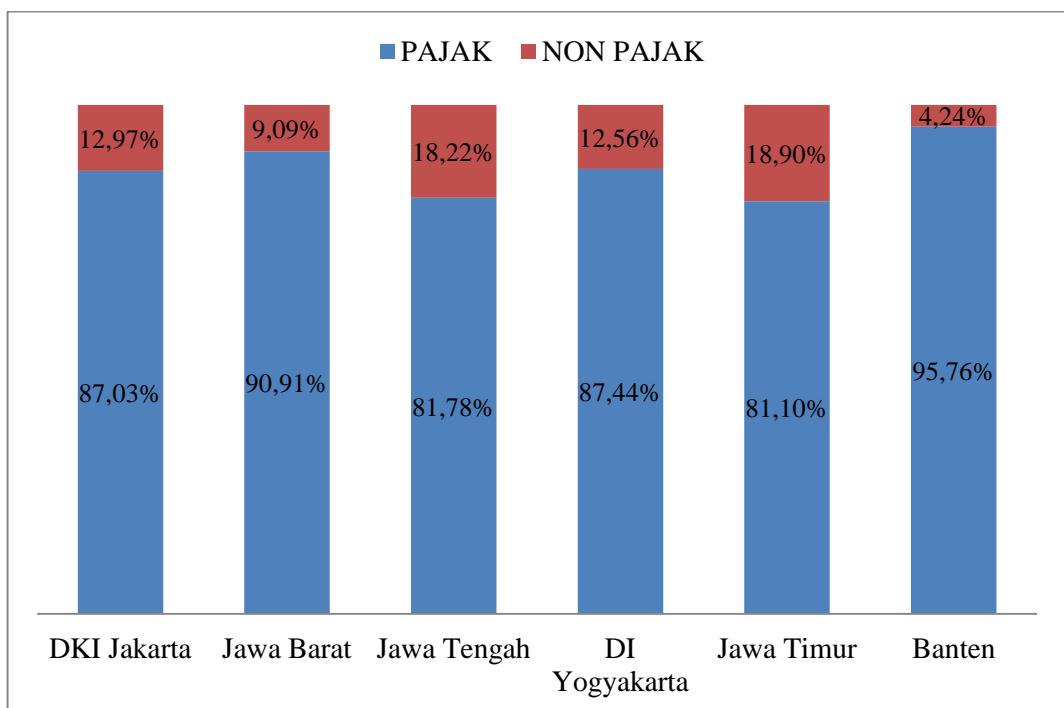


Sumber: BPS (diolah)

Gambar 12. Rata-rata Pencapaian Derajat Desentralisasi Fiskal Pulau Jawa.

Gambar 12 menunjukkan bahwa selama tahun 2007 hingga 2013 tren peningkatan rata-rata derajat desentralisasi fiskal se Jawa di atas 50 persen atau dalam kategori sangat baik namun rata-rata indeks Gini terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun derajat desentralisasi fiskal di provinsi-provinsi Jawa dalam kategori sangat baik ternyata belum mampu memberikan pengaruh dalam penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, justru kenaikan derajat desentralisasi fiskal diikuti dengan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan

Tidak meratanya sektor penyumbang pembangunan ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sektor pajak yang menyumbang proporsi terbesar PAD dinilai sebagai salah satu alasannya.



Sumber: BPS, 2014 (diolah)

Gambar 13. Perbandingan komposisi pembentuk PAD (pajak dan non pajak) provinsi se Jawa tahun 2013

Berdasarkan Gambar 13. pada tahun 2013 diketahui bahwa sektor pajak semua provinsi di Jawa merupakan penyumbang utama PAD. Muhammad (2014: 3) menjelaskan bahwa fokus pemerintah untuk menaikkan PAD dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah pada akhirnya PAD dapat saja meningkat tetapi kinerja perekonomian menjadi kurang baik.

Wibowo (2004:22) menyarankan bahwa kebijakan merancang struktur pajak baru setelah desentralisasi fiskal harus hati-hati. Memaksakan pajak baru untuk mendorong meningkatkan kinerja ekonomi harus pula mempertimbangkan fakta bahwa pajak juga memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Disamping sektor pajak, sektor pertumbuhan ekonomi atau kutub pertumbuhan ekonomi lain perlu digali agar perekonomian semakin merata dan komponen pembentuk PAD dapat didukung dari sektor lain. Tarigan (dalam Simonsen, 2011) menjelaskan bahwa semakin banyak kutub pertumbuhan dalam suatu daerah maka akan semakin rata distribusi pendapatan daerah tersebut, walaupun daerah-daerah kumuh (*slum*) akan muncul, lambat laun daerah kumuh ini akan berkurang seiring dengan munculnya kutub-kutub pertumbuhan ekonomi yang baru. Pemerataan kutub pertumbuhan yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu pemerataan pendapatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Gini yang dijadikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa berada dalam kategori ketimpangan sedang dimana provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempati posisi teratas provinsi dengan ketimpangan yang melebihi rata-rata se Jawa.
2. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2007-2013 dipengaruhi oleh PDRB per kapita, populasi penduduk, dan TPT. Ketiga faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.
3. Populasi penduduk merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa dengan nilai koefisien sebesar 0,656604 pada taraf signifikansi 5%.
4. Secara simultan faktor PDRB per Kapita, Penduduk, TPT, dan Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa yang termasuk dalam kategori sedang perlu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan ekonomi maupun non ekonomi yang saling mendukung agar ketimpangan distribusi pendapatan dapat membaik sehingga distribusi pendapatan dapat lebih merata.
2. Tiga faktor yang dijadikan variabel bebas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan sehingga kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang biasa diukur melalui peningkatan PDRB per kapita perlu diikuti dengan meratanya sektor perekonomian di semua wilayah. Peningkatan partisipasi tenaga kerja di semua daerah juga perlu diperhatikan guna pemerataan penduduk dan mencegah tingginya arus urbanisasi.
4. Otonomi daerah merupakan wewenang yang harus dijalankan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Usaha menciptakan sumber perekonomian baru dan pembangunan infrastuktur penunjang otonomi daerah perlu dilakukan untuk mencapai kemandirian daerah sehingga keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bersumber dari peningkatan penerimaan pajak.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel bebas yang digunakan hanya empat variabel dari 12 variabel pada penelitian acuan sehingga koefisien negatif yang muncul dimungkinkan karena kurangnya variabel bebas lain yang digunakan dalam penelitian.
2. Wilayah penelitian yang terbatas pada provinsi-provinsi di Jawa. Penelitian akan lebih baik jika seluruh provinsi dijadikan objek penelitian dan menggunakan *dummy* wilayah ataupun *dummy* kriteria lain sehingga dapat dianalisis pengaruh variabel-variabel bebas tertentu dan hasil penelitian dapat lebih informatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Haris Hermana. 2010. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Pantai Timur Sumatra Utara tahun 2005-2009. *Skripsi*. Sumatre Utara: Universitas Negeri Medan.
- Akai, Nobuo dan Masayo Sakata. 2005. *Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States*. CIRJE-F-315. Diakses dari <http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/03research02dp.html> pada 7 September 2015.
- Bank Dunia. 2012. *Mempercepat Laju: Revitalisasi Pertumbuhan di Sektor Manufaktur Indonesia*. Indonesia: Jakarta.
- Bappeda Kota Semarang. 2012. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang Tahun 2011.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- BPS. 2013. *Indeks Gini*. Diakses dari <http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=1461> pada 11 September 2011.
- BPS. _____. *Pendapatan Nasional*. Diakses dari <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11> pada 11 April 2015.
- BPS. _____. *Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000*. Diakses dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1628> pada 7 September 2015.
- BPS. _____. Tingkat Pengangguran Terbuka. Diakses dari <http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981> pada 7 September 2015.
- BPS. 2007. *Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 2005 – 2015*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 2010-2035*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BPS. 2014. *Statistik Indonesia 2014*. Jakarta: BPS.

- BPS. 2014. *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2010. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2007-2010*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2013. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2010-2013*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2011-2014*. Jakarta: BPS.
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi: Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Estudillo, Jonna P. 1997. Income Inequality In The Philippines, 1961–91. *Journal The Developing Economies*, XXXV-1. Diakses http://www.ide.go.jp/English/Publish/Periodicals/De/pdf/97_01_04.pdf pada 28 Januari 2016
- Gujarati, D. N. and D.C. Porter. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Hadi Sasana. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 10, Nomor 1*. Universitas Diponegoro.
- Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Joko Tri Handoyo. 2015. *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46912> pada 7 September 2015.
- Kementerian Keuangan. 2010. *Grand Design Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/186/GrandDesignFD2.pdf> pada 11 September 2015.
- Kodrat, Wibowo. 2004. Lessons From Previous Taxes' Studies To Indonesian Local And Regional Governments After Fiscal Decentralization. *Working Paper in Economics and Development Studies No. 200402*. Universitas Padjajaran.
- Lincoln Arsyad. 2010. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Lintantia Fajar Apriesa. 2013, Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Kabupaten/Kota Di Jawa

- Tengah). *Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, Nomor 1.* Universitas Diponegoro.
- Muhammad Amir Arham. 2014. Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, Dan Ketimpangan Antar kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia Vol. 14 No. 2, Januari 2014: 1-ISSN 1411-5212.* Universitas Gorontalo
- Nachrowi Djalal Nachrowi. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometri.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Simonsen Sianturi. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara). diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/29289/1/Jurnal.pdf> pada 9 September 2015.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi: Jilid 1.* Jakarta: Erlangga.
- Tulus T.H. Tambunan. 2011. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ulfie Efriza. 2014. Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Di Era Desentralisasi Fiskal. Malang: Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Provinsi	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4		
		Indeks Gini	PDRB per Kapita ADHK 2000 (ribu rupiah)	Penduduk (ribuan)	TPT (%)	PAD	Total Penerimaan (TP)	Desentralisasi Fiskal (PAD/TP) (%)
DKI Jakarta	2007	0,336	36.054	9.253,6	12,57	8.731.096.245	16.668.046.974	52.38
	2008	0,33	37.782	9.382,7	12,16	10.455.565.541	19.221.757.881	54.39
	2009	0,36	39.144	9.512,7	12,15	10.601.057.958	19.251.893.888	55.07
	2010	0,36	41.038	9.640,4	11,05	12.891.992.182	23.025.986.993	55.99
	2011	0,44	43.298	9.752,1	10,8	17.825.986.987	28.297.361.175	63
	2012	0,42	45.610	9.862,1	9,87	22.040.801.448	35.379.180.052	62.3
	2013	0,433	47.872	9.969,9	9,02	26.852.192.453	39.517.544.012	67.95
Jawa Barat	2007	0,344	6.719	40.893,7	13,08	4.221.668.696	6.008.240.717	70.26
	2008	0,35	7.005	41.662,6	12,08	5.275.051.504	7.275.007.134	72.51
	2009	0,36	7.166	42.445,9	10,96	5.577.588.779	7.785.889.984	71.64

	2010	0,36	7.454	43.227,1	10,33	7.252.242.913	9.742.187.781	74.44
	2011	0,41	7.811	43.938,8	9,83	8.502.643.155	11.053.859.588	76.92
	2012	0,41	8.170	44.643,5	9,08	9.982.917.415	16.878.128.995	59.15
	2013	0,411	8.532	45.340,8	9,22	12.360.109.870	19.237.611.310	64.25
Jawa Tengah	2007	0,326	4.960	32.128,3	7,7	2.932.805.173	4.363.512.594	67,21
	2008	0,31	5.221	32.239,4	7,35	3.698.843.478	5.203.414.609	71,08
	2009	0,32	5.471	32.347,8	7,33	4.000.735.711	5.696.660.052	70,23
	2010	0,34	5.764	32.443,9	6,21	4.785.133.227	6.626.316.989	72,21
	2011	0,38	6.059	32.725,4	5,93	5.564.233.152	7.547.669.804	73,72
	2012	0,38	6.390	32.998,7	5,63	6.629.308.010	11.694.479.699	56,69
	2013	0,387	6.707	33.264,3	6,02	8.212.800.641	13.343.358.327	61,55
DI Yogyakarta	2007	0,366	5.445	3.366,9	6,1	488.890.620	1.306.701.213	37,41
	2008	0,36	5.662	3.401,4	5,38	632.872.312	1.258.609.946	50,28
	2009	0,38	5.855	3.436	6	645.145.551	1.286.067.485	50,16
	2010	0,41	6.069	3.467,5	5,69	740.202.076	1.374.205.096	53,86
	2011	0,4	6.305	3.510	3,97	867.112.885	1.604.910.831	54,03
	2012	0,43	6.561	3.552,5	3,97	1.004.063.126	2.171.734.308	46,23
	2013	0,439	6.834	3.594,9	3,34	1.216.102.750	2.583.056.764	47,08

Jawa Timur	2007	0,337	7.857	36.783,7	6,79	4.164.250.657	5.940.048.020	70,1
	2008	0,33	8.264	37.057,8	6,42	5.212.319.316	7.075.105.413	73,67
	2009	0,33	8.617	37.330,6	5,08	5.708.030.337	7.827.694.815	72,92
	2010	0,34	9.112	37.565,7	4,25	7.478.530.080	9.980.544.750	74,93
	2011	0,37	9.698	37.840,7	4,16	8.898.616.683	11.493.375.583	77,42
	2012	0,36	10.331	38.106,6	4,12	9.725.627.569	15.543.039.549	62,57
	2013	0,364	10.933	38.363,2	4,33	11.596.376.615	17.372.768.544	66,75
Banten	2007	0,365	7.668	9.852	15,75	1.298.456.276	1.908.840.531	68,02
	2008	0,34	7.894	10.125,2	15,18	1.661.168.634	2.351.380.505	70,65
	2009	0,37	8.045	10.405,3	14,97	1.687.721.367	2.436.096.122	69,28
	2010	0,42	8.285	10.688,6	13,68	2.321.586.438	3.139.437.626	73,95
	2011	0,4	8.607	10.943,8	13,06	2.895.569.551	3.755.614.332	77,1
	2012	0,39	8.929	11.198,6	10,13	3.395.883.044	5.413.705.184	62,73
	2013	0,399	9.243	11.452,5	9,9	4.118.551.716	6.230.229.814	66,11

Lampiran 2. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Sample: 2007 2013					
	IG	PDRBPK	POP	TPT	DDF
Mean	0.373024	13105.74	22850.41	8.720000	64.24262
Median	0.365500	7875.500	21790.40	8.480000	66.98000
Maximum	0.440000	47872.00	45340.80	15.93000	77.42000
Minimum	0.310000	4960.000	3366.900	3.570000	37.41000
Std. Dev.	0.035438	13047.20	15604.51	3.519381	9.820130
Skewness	0.259645	1.808724	0.056627	0.307467	-0.717248
Kurtosis	2.039959	4.462551	1.256961	1.911891	2.722656
Jarque-Bera	2.084847	26.64373	5.339270	2.733716	3.735718
Probability	0.352599	0.000002	0.069277	0.254907	0.154454
Sum	15.66700	550441.0	959717.2	366.2400	2698.190
Sum Sq. Dev.	0.051491	6.98E+09	9.98E+09	507.8278	3953.833
Observations	42	42	42	42	42

Lampiran 3. Uji Spesifikasi Model

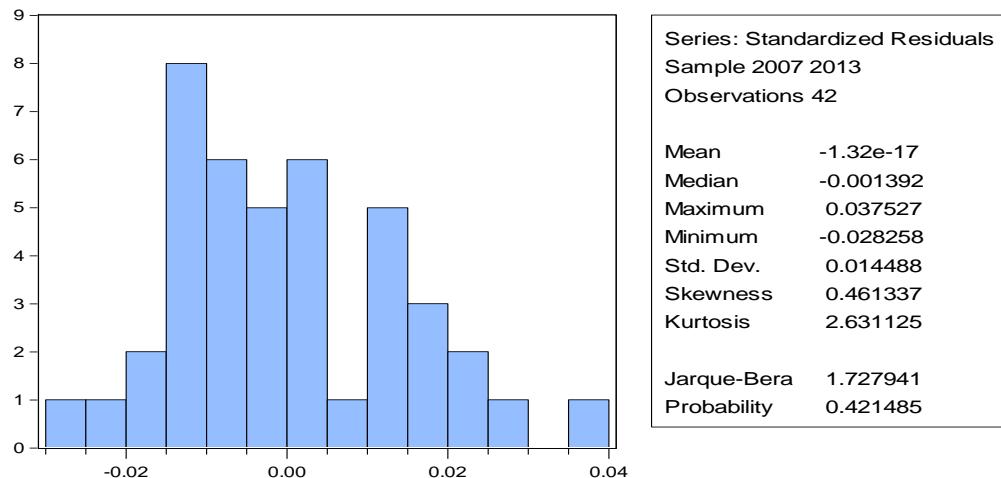
a. Uji *likelihood Ratio*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	24.387652	(5,32)	0.0000
Cross-section Chi-square	65.974260	5	0.0000

b. Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	70.903616	4	0.0000

Lampiran 4.Uji Normalitas



Lampiran 5. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(RESIDUAL^2)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/16/16 Time: 07:33				
Sample: 2007 2013				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 42				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNPDRBPK	6.594090	8.667167	0.760813	0.4523
LNPOP	5.542746	40.39094	0.137227	0.8917
TPT	0.739699	0.969162	0.763236	0.4509
DDF	-0.012176	0.081432	-0.149525	0.8821
C	-129.7803	398.3176	-0.325821	0.7467
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.071887	Mean dependent var	-9.807240	
Adjusted R-squared	-0.189145	S.D. dependent var	2.483473	
S.E. of regression	2.708176	Akaike info criterion	5.034685	
Sum squared resid	234.6950	Schwarz criterion	5.448416	
Log likelihood	-95.72838	Hannan-Quinn criter.	5.186334	
F-statistic	0.275394	Durbin-Watson stat	2.026281	
Prob(F-statistic)	0.976879			

Lampiran 6. Uji Multikolinearitas

	LNPDRBPK	LNPOP	TPT	DDF
LNPDRBPK	1.000000	-0.168265	0.334212	-0.132585
LNPOP	-0.168265	1.000000	-0.013965	0.726888
TPT	0.334212	-0.013965	1.000000	0.263203
DDF	-0.132585	0.726888	0.263203	1.000000

Lampiran 7. Uji Autokorelasi

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.832860	Mean dependent var	0.373024
Adjusted R-squared	0.785852	S.D. dependent var	0.035438
S.E. of regression	0.016400	Akaike info criterion	-5.178873
Sum squared resid	0.008606	Schwarz criterion	-4.765142
Log likelihood	118.7563	Hannan-Quinn criter.	-5.027224
F-statistic	17.71734	Durbin-Watson stat	2.087088
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8. Hasil Regresi Data Panel

a. Pooled Least Square/ Common Effect Model

Dependent Variable: IG				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/16/16 Time: 07:29				
Sample: 2007 2013				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 42				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNPDRBPK	0.009001	0.008375	1.074808	0.2894
LNPOP	-0.018946	0.008680	-2.182718	0.0355
TPT	-0.001418	0.001745	-0.812658	0.4216
DDF	0.000571	0.000857	0.665678	0.5097
C	0.449841	0.098821	4.552083	0.0001
R-squared	0.195960	Mean dependent var	0.373024	
Adjusted R-squared	0.109037	S.D. dependent var	0.035438	
S.E. of regression	0.033451	Akaike info criterion	-3.846153	
Sum squared resid	0.041401	Schwarz criterion	-3.639287	
Log likelihood	85.76921	Hannan-Quinn criter.	-3.770328	
F-statistic	2.254408	Durbin-Watson stat	0.549949	
Prob(F-statistic)	0.081803			

b. Fixed Effect Model

Dependent Variable: IG				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/16/16 Time: 07:28				
Sample: 2007 2013				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 42				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNPDRBPK	0.278708	0.052485	5.310292	0.0000
LNPOP	0.656604	0.244590	2.684511	0.0114
TPT	0.013688	0.005869	2.332313	0.0261
DDF	0.000775	0.000493	1.571855	0.1258
C	-8.723781	2.412035	-3.616773	0.0010
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.832860	Mean dependent var	0.373024	
Adjusted R-squared	0.785852	S.D. dependent var	0.035438	
S.E. of regression	0.016400	Akaike info criterion	-5.178873	
Sum squared resid	0.008606	Schwarz criterion	-4.765142	
Log likelihood	118.7563	Hannan-Quinn criter.	-5.027224	
F-statistic	17.71734	Durbin-Watson stat	2.087088	
Prob(F-statistic)	0.000000			

c. Random Effect Model

Dependent Variable: IG				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 03/16/16 Time: 07:29				
Sample: 2007 2013				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 42				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNPDRBPK	0.032142	0.008446	3.805735	0.0005
LNPOP	-0.018272	0.007372	-2.478587	0.0179
TPT	-0.007377	0.001358	-5.431001	0.0000
DDF	0.001030	0.000472	2.182121	0.0355
C	0.253296	0.106108	2.387159	0.0222
Effects Specification		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.012744	0.3765	
Idiosyncratic random		0.016400	0.6235	
Weighted Statistics				
R-squared	0.296221	Mean dependent var	0.163152	
Adjusted R-squared	0.220137	S.D. dependent var	0.031120	
S.E. of regression	0.027482	Sum squared resid	0.027944	
F-statistic	3.893335	Durbin-Watson stat	0.815219	
Prob(F-statistic)	0.009753			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.139250	Mean dependent var	0.373024	
Sum squared resid	0.058661	Durbin-Watson stat	0.388344	